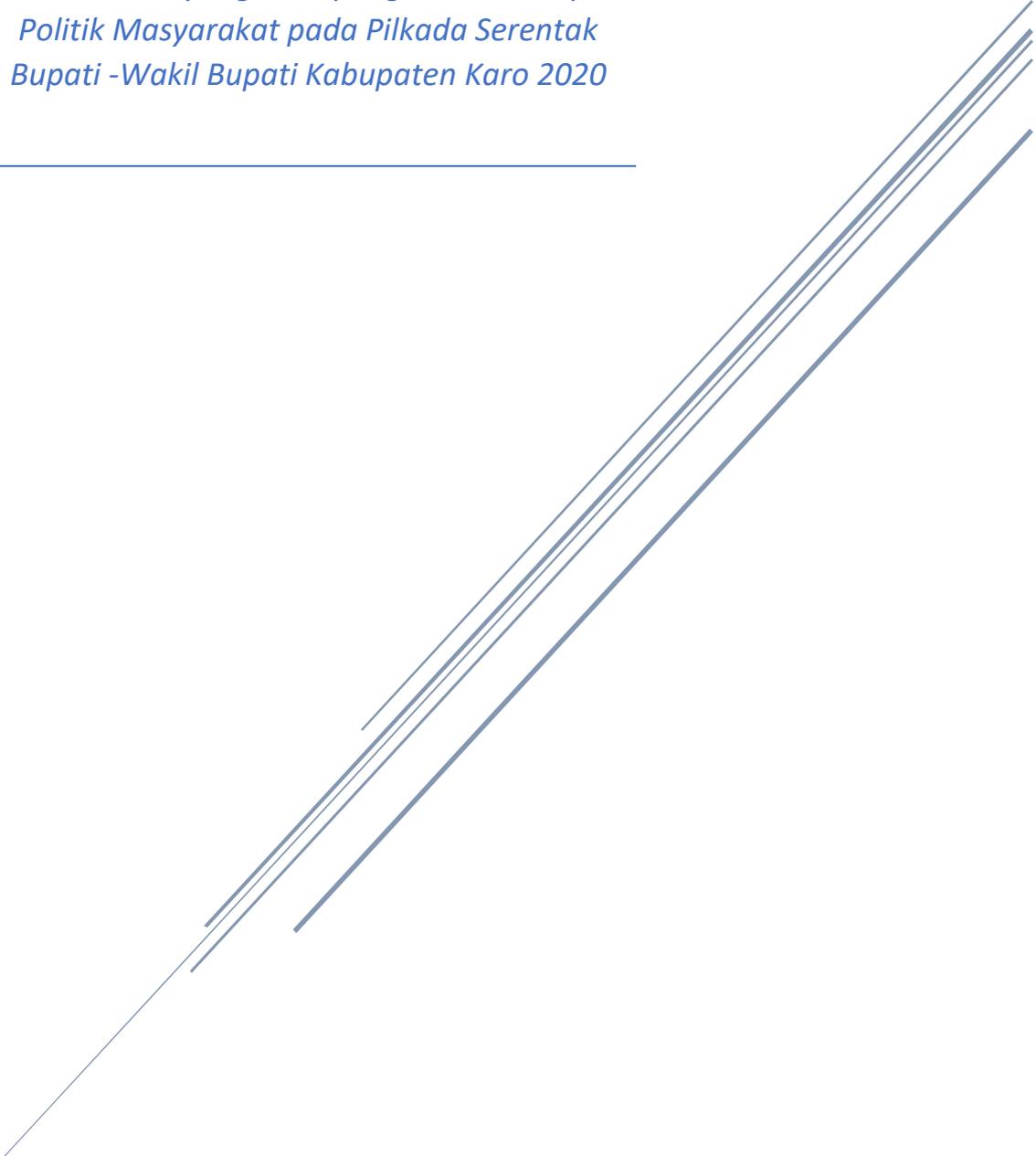


# LAPORAN AKHIR

---

*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi  
Politik Masyarakat pada Pilkada Serentak  
Bupati -Wakil Bupati Kabupaten Karo 2020*

---



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur dipanjatkan kepada ALLAH SWT karena berkat ridhoNYA, Laporan Akhir Kajian Partisipasi Masyarakat berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo 2020 ini dapat diselesaikan dengan baik. Kajian Partisipasi masyarakat ini terwujud berkat adanya dukungan dan kerjasama dari KPU Kabupaten Karo. Riset ini sendiri bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020.

Dalam penyelesaian laporan hasil riset ini, tim peneliti banyak menerima dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Tim Peneliti, oleh itu, mengucapkan terimakasih kepada Ketua dan seluruh anggota komisioner KPU Kabupaten Karo, Sekretaris dan tim sekretariat KPU Kabupaten Karo, serta anggota PPK, PPS yang telah berpartisipasi dalam riset ini.

Akhirnya, kritikan dan masukan dari berbagai pihak khususnya KPU Kabupaten Karo sangat diperlukan demi lebih baiknya hasil riset ini.

Terimakasih

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL/GRAFIK .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan Kajian .....	2
D. Manfaat Kajian .....	2
<b>BAB II</b>	
<b>TINJAUAN TEORI .....</b>	<b>3</b>
A. Kerangka Teori .....	3
B. Perilaku Pemilih .....	5
C. Pemilihan Serentak Tahun 2020 .....	9
<b>BAB III</b>	
<b>METODE KAJIAN .....</b>	<b>11</b>
A. Metode Penelitian .....	11
B. Aspek Kajian .....	11
C. Metode Pengumpulan Data.....	11
D. Teknik Analisa/ Pengujian Data .....	12
<b>BAB IV</b>	
<b>HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>13</b>
A. Gambaran Umum .....	13
B. Temuan Hasil .....	18
1. Terpaan Informasi tentang Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Karo .....	18
2. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik di Kabupaten Karo .....	21
3. Konteks Situasi Partisipasi Politik di Kabupaten Karo .....	27
<b>BAB V</b>	
<b>SIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>	<b>31</b>
A. Simpulan .....	31

B. Rekomendasi .....	32
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>34</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>v</b>
Lampiran 1. Notulensi FGD Penyelenggara Pemilu .....	vi
Lampiran 2. Catatan Lapangan FGD Pemilih .....	xi
Lampiran 3. Daftar Hadir FGD .....	xv
Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan FGD .....	xix

## DAFTAR TABEL/GRAFIK

### Tabel

Tabel 1. Data Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Karo Per Kecamatan .....	16
--	----

### Grafik

Grafik 1. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Karo .....	14
Grafik 2. Peta Partisipasi Masyarakat Kabupaten Karo dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 .....	15
Grafik 3. Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Namanteran .....	16
Grafik 4. Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Kabanjahe .....	16
Grafik 5. Komposisi Penduduk Indonesia .....	19
Grafik 6. Partisipasi Politik Masyarakat Karo .....	22
Grafik 7. Terpaan Informasi pada Pemilih Kabupaten Karo .....	25

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemilihan Serentak merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wadah perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Keberhasilan Pemilihan tentu tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan masyarakat melalui partisipasinya. Pasal 57 UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa hak pilih merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilihan dalam rangka menuntukan nasib suatu daerah, serta jaminan bagi masyarakat yang memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya. Bagi masyarakat penggunaan hak pilih merupakan bagian penting untuk memastikan kontribusinya dalam tataran politik lokal. Masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses pembuatan keputusan politik di daerah. Untuk mewujudkan pemilihan yang demokratis, lancar, dan aman, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat.

Pemilihan serentak tahun 2020 diselenggarakan pada 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota di seluruh Indonesia. Kabupaten Karo menjadi satu dari 37 daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo diikuti oleh 5 pasangan calon, yaitu pasangan Jusua Ginting, S. IP – dr. Saberina br Tarigan, MARS, Cuaca Bangun, S.E., AK., M. Si., SH., MH. – Agen Purba, Iwan Sembiring Depari, SH. - Ir. Budianto Surbakti, MM., Yus Felesky Surbakti – Drs. Paulus Sitepu, dan Cory Setiawati Sebayang – Theopilus Ginting. Suara terbanyak diperoleh pasangan Cory Setiawati Sebayang – Theopilus Ginting dengan jumlah suara mencapai 59.608 suara.

Persentase total partisipasi masyarakat di Kabupaten Karo mencapai 68 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sudah baik, karena mampu mendekati target partisipasi politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebesar 77,5 persen.

Kabupaten Karo memiliki kekhasan karakteristik masyarakat yang berbeda dengan masyarakat di daerah lain. Sebagai wilayah pertanian, mayoritas penduduknya hidup dari mata pencarian sebagai petani. Karakteristik budayanya juga sangat kuat, ditambah sistem

kekerabatan yang erat pula. Untuk itu menjadi menarik untuk mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan tingginya tingkat partisipasi politik pada masyarakat Kabupaten Karo.

#### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah **“faktor apa yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020?”**.

#### **C. Tujuan Kajian**

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah:

**Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020.**

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis, hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi peneliti atau pihak lain yang ingin mengetahui fenomena partisipasi masyarakat pemilih di Kabupaten Karo dalam memilih Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.
2. Secara praktis, hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan untuk perbaikan penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Budaya Politik**

Budaya politik merupakan pola perilaku individu dan orientasinya dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat (Kantaprawira, 2006: 25). Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif. Budaya politik lahir dari sebuah sistem politik yang dijalankan suatu negara, karena setiap sistem politik akan mewujudkan dirinya di dalam pola orientasi-orientasi dan tindakan-tindakan politik tertentu (Almond, 1965: 20).

Budaya politik mendeskripsikan keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma, pola dan orientasi terhadap politik. Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu yang beroperasi di dalam masyarakat, serta harapan-harapannya (Budiarjo, 2008: 58).

Kegiatan politik warga negara ditentukan oleh harapan dan pandangannya mengenai situasi politik. Lebih jauh, warga negara akan mengidentifikasi diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki untuk mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.

Budaya politik lahir akibat muncul orientasi masyarakat yang kemudian tercermin dalam perilaku politik. Terdapat tiga klasifikasi tipe-tipe orientasi politik ((Almond, 1984: 16)), yaitu:

- a. Orientasi kognitif, yaitu kemampuan yang menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan individu terhadap jalannya sistem politik dan atributnya.
- b. Orientasi afektif, yaitu menyangkut perasaan seorang warga negara terhadap sistem politik dan peranannya yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik.

- c. Orientasi evaluatif, yaitu menyangkut keputusan dan praduga tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Berdasarkan orientasi-orientasi warga negara terhadap kehidupan politiknya, terdapat tiga jenis budaya politik, yaitu:

- a. Budaya Politik Parokial, yaitu peranan politik atau partisipasi politik yang sangat rendah karena disebabkan oleh faktor kognitif. Budaya politik parokial ditandai dengan tidak berkembangnya harapan-harapan akan perubahan yang akan datang dari sistem politik. Budaya politik parokial merupakan fenomena umum yang biasa ditemukan dalam masyarakat-masyarakat yang belum berkembang (Almond, 1984: 18).
- b. Budaya Politik Subjek/ Kaula, dimana masyarakat memiliki frekuensi orientasi-orientasi yang tinggi terhadap sistem politik, namun perhatian dari intensitas orientasi mereka terhadap *input* dan *output* masih sangat rendah. Posisi masyarakat sebagai Subjek/ Kaula dipandang sebagai posisi pasif karena tidak menentukan apa-apa terhadap perubahan politik (Almond, 1984: 21).
- c. Budaya Politik Partisipan, dimana masyarakat sudah memiliki orientasi politik yang secara langsung ditujukan kepada sistem secara keseluruhan, bahkan terhadap struktur, proses politik dan administratif. *Input* dan *output* terhadap sistem politik juga sudah sangat tinggi. Dalam budaya politik ini, masyarakat dianggap sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik, karena memiliki kesadaran terhadap hak dan tanggungjawabnya (Almond, 1984: 22).

Budaya politik menunjuk pada orientasi dari tingkah laku individu dan masyarakat. Masyarakat mengidentifikasi dirinya terhadap simbol-simbol dari lembaga negara. Orientasi dan perilaku politik terwujud dalam bentuk keterlibatan di bidang politik dalam kehidupan negara. Salah satu contoh adalah ikut memberikan suara dalam memilih pemimpin, baik di tingkat lokal ataupun nasional.

Di dalam sebuah pemilihan, perilaku politik masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap budaya politik. Apakah masyarakat bersikap rasional, pragmatis atau apatis terhadap pemilihan yang berlangsung. Terdapat faktor-faktor yang turut mempengaruhi budaya politik pada suatu masyarakat, diantaranya:

1. Karakter Nasional/ Lokal
2. Orientasi terhadap kekuasaan

3. Rekrutmen pemimpin; dan
4. Gaya politik

Budaya politik yang dimiliki masing-masing negara atau masyarakat berbeda satu sama lain. Teori ini digunakan untuk menganalisa jenis budaya politik masyarakat Kabupaten Karo dan faktor apa saja yang membentuk serta mempengaruhi budaya politik tersebut, khususnya saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020.

## **B. Perilaku Pemilih**

Dalam konteks politik, perilaku dikategorikan sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, dan penegakkan keputusan politik. Perilaku politik dibagi menjadi dua, yakni perilaku politik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan para pejabat pemerintah, serta perilaku politik yang dilakukan oleh warga negara biasa (Surbakti, 2010: 16). Perilaku yang dilakukan lembaga pemerintah adalah bertanggungjawab atas wewenang proses politik, sedangkan perilaku warga negara salah satunya adalah memberikan suara atau menggunakan hak pilih dalam memilih pemimpin.

Perilaku memilih merupakan realitas politik yang tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal dan internal. Secara eksternal, perilaku memilih merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari lingkungannya, sedangkan secara internal merupakan tindakan yang didasarkan atas rasionalitas berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku memilih, misalnya isu-isu dan kebijakan politik. Secara umum, hal yang paling mendasar dalam mempengaruhi perilaku memilih antara lain, ialah pengaruh elit, iidentifikasi kepartaian, pengaruh sistem sosial yang ada di masyarakat, pengaruh media massa, dan aliran politik (Firmanzah, 2008: 85).

Perilaku memilih warga negara dibedakan kedalam lima pendekatan (Surbakti, 2010: 186-188), antara lain adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Struktural**

Pada pendekatan struktural melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan oleh setiap partai. Pada struktur sosial

menjadi sumber kemajemukan politik dapat berupa kelas sosial atau perbedaan-perbedaan antara majikan dan pekerja, agaman, perbedaan kota dan desa, serta bahasa dan nasionalisme.

## **2. Pendekatan Sosiologis**

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum kepala daerah secara langsung dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, Pendidikan, kelas sosial, pendapatan, dan agama.

## **3. Pendekatan Ekologis**

Pendekatan ekologis ini hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Seperti di Amerika Serikat terdapat sistem distrik, *precint*, dan *ward*. Kelompok masyarakat, seperti tipe penganut agama tertentu, buruh, kelas menengah, mahasiswa, suku tertentu, subkultur tertentu dan profesi tertentu yang bertempat tinggal di unit territorial dapat dijadikan penjelasan atas perubahan hasil pemilihan umum.

## **4. Pendekatan Psikologis Sosial**

Konsep psikologi sosial digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih pada pemilihan umum kepala daerah secara langsung berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Konkretnya, partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lainnya.

## **5. Pendekatan Pilihan Rasional**

Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Pertimbangan tidak hanya hanya "ongkos" memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga berbeda alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah.

Perilaku pemilih merupakan sebuah studi yang memusatkan pemilih sebagai objek dari masalah yang diteliti. Berikut konfigurasi atau tipe-tipe pemilih (Firmanzah, 2008: 120-125):

### **1. Pemilih Rasional**

Pemilih rasional (*rational voter*), dimana pemilih memiliki orientasi tinggi pada "*policy-problemsolving*" dan berorientasi rendah untuk faktor odeologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atai calon kontestan dalam program kerjanya. Ciri khas pemilih jenis ini adalah tidak begitu mementingkan ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau seorang kontestan. Hal yang terpenting bagi para pemilih jenis ini adalah apa yang bisa (dan yang telah) dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan, daripada paham dan nilai yang dimiliki oleh seorang kontestan.

### **2. Pemilih Kritis**

Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau kontestan dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Pentingnya ikatan ideologis membuat loyalitas pemilih terhadap sebuah partai atau seorang kontestan cukup tinggi dan tidak semuda *rational vote* untuk berpaling ke partai lainnya. Proses untuk menjadi pemilih jenis ini bisa terjadi melalui dua mekanisme. *Pertama*, menjadikan nilai-nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai politik mana mereka akan berpihak dan selanjutnya akan mengkritisi kebijakan yang akan atau telah dilakukan. *Kedua*, bisa juga terjadi sebaliknya, dimana pemilih tertarik dulu dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai/ kontestan baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan paham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan.

### **3. Pemilih Tradisional**

Pemilih dalam jenis ini memiliki orientasi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial budayanya, nilai, asal-usul, paham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih suatu partai politik. Kebijakan semisal ekonomi, kesejahteraan, pemerataan pendapatan dan Pendidikan, serta pengurangan angka inflasi dianggap sebagai parameter kedua.

#### 4. Pemilih Skeptis

Pemilih jenis ini tidak memiliki orientasi ideologi yang cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau seorang kontestan, juga tidak menjadikan kebijakan sebagai sesuatu yang penting. Keinginan untuk terlibat dalam sebuah partai politik pada pemilih jenis ini sangat kurang, karena ikatana ideologis mereka memang rendah sekali. Mereka juga kurang memperdulikan *platform* dan kebijakan sebuah partai politik. Kalaupun berpartisipasi dalam pemungutan suara, biasanya mereka melakukannya secara acak atau *random*.

Selain pendekatan dan tipe-tipe pemilih yang sudah dijelaskan, terdapat faktor lain yang mempengaruhi perilaku pemilih seperti kampanye negatif. Kampanye negative merupakan salah satu fenomena politik yang seringkali muncul dalam berbagai peristiwa politik. Fenomena kampanye negatif dianggap menjadi perhatian utama dari banyak kalangan peneliti politik. Hal ini dikarenakan kampanye negatif terjadi tidak hanya pada arena formal, namun juga dalam keseluruhan peristiwa pemilihan yang sedang berlangsung.

Menurut *The American Heritage Dictionary of the English Language*, kampanye negatif dimaknai sebagai sebuah kampanye politik yang mengekspresikan, memuat atau di dalamnya terdapat negasi, atau penyangkalan terhadap kebenaran fakta. Ansolabehere dan Iyengar (1995), dalam studi eksperimentalnya menunjukkan bahwa paparan kampanye negatif mengurangi jumlah pemilih sebesar 5%, dan data survei memperkuat temuan bahwa kampanye negatif mengarah pada “demobilisasi pemilih” (Kaid, 2004: 174).

Kampanye negatif menjadi ancaman bagi perilaku pemilih. Dari kelompok usia pemilih, pemilih pemula menjadi kelompok yang paling rentan terpengaruh oleh kampanye negatif. Rahn dan Hirshorn (1999) menemukan bahwa kampanye negatif mempengaruhi sikap anak-anak terhadap sistem politik, mereka dengan keinginan yang tinggi menerima kampanye negatif, cenderung tidak memberikan suara (Kaid, 2004: 174).

Teori perilaku pemilih ini digunakan untuk menganalisis perilaku pemilih masyarakat Kabupaten Karo. Nantinya, akan dijabarkan secara menyeluruh mengenai model dan tipe perilaku pemilih, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020.

### C. Pemilihan Serentak Tahun 2020

Pemilihan umum (pemilu) merupakan konsekuensi logis dari negara demokrasi. Pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang”. Ini menandakan Indonesia adalah negara demokratis. Demokrasi, negara hukum, dan negara kesejahteraan menjadi dasar filosofis dari penyelenggaraan pemilu (Nugraha, 2018: 61). Menurut Satjipto Rahardjo, Pemilu yang demokratis merupakan kontrak sosial baru antar rakyat dengan pemimpin pemerintahan (Budhiati, 2013: 268).

Pada tahun 2020, Indonesia melaksanakan pesta demokrasi yaitu Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020. Pemilihan Kepala Daerah Serentak artinya pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat untuk memilih pemimpin di tingkat daerah seperti Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Terdapat 270 daerah yang melakukan pemilihan yang terdiri dari 9 provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Pemilihan serentak tahun 2020 awalnya direncanakan terlaksana pada 23 September 2020, yang kemudian ditunda sampai 9 Desember 2020 akibat pandemi Covid-19.

Pemilihan serentak tahun 2020 merupakan pelaksanaan amanat Pasal 201 ayat 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berisikan “Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020”. Akibat pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pemilihan Serentak tahun 2020 diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat, pemilihan ini diperlukan mengingat peran dan posisi dari kepala daerah memang dibutuhkan untuk saling bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan Covid-19 serta pemulihan pasca Covid-19.

Sebelumnya, KPU sebagai penyelenggara pemilihan telah mengambil langkah penundaan tahapan pemilihan yang tengah berjalan dengan mengeluarkan Surat

Keputusan No. 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020. Setelah keluarnya Keputusan KPU, Komisi II DPR RI, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP menggelar pertemuan untuk memutuskan pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2020.

Keputusan itu tertuang lewat Perppu No. 2 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 memberikan kepastian hukum akan pelaksanaan Pemilihan tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19. Di dalam ketentuan Pasal 201 A ayat (2) ditegaskan bahwa pemungutan suara Pemilihan tahun 2020 dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Pelaksanaan Pemilihan Serentak di masa pandemi Covid-19 banyak menuai kontra di masyarakat. Masyarakat menganggap pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2020 sangat berisiko menularkan Covid-19 karena berpotensi memunculkan kerumunan-kerumunan massa. Hal ini terbukti dengan hari pertama pendaftaran calon di berbagai daerah memancing kerumunan dengan melakukan konvoi yang kebanyakan tidak memperhatikan protokol kesehatan (Ristyawati, 2020: 90). Selain itu, pelaksanaan Pemilihan Serentak juga berpotensi menciptakan praktik kecurangan. Sebagai contoh adanya potensi politik uang yang semakin marak di tengah kondisi pandemi (Ristyawati, 2020: 90). Terakhir, gelombang penolakan ini berpotensi meningkatkan angka golput. Menjadi golput boleh jadi adalah pilihan yang paling rasional mengingat kesehatan dan keselamatan publik tengah terancam di tengah situasi wabah covid-19 yang sangat membuat resah (Ristyawati, 2020: 91). Konsep pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2020 di tengah kondisi pandemi Covid-19 dijadikan rujukan untuk melihat faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih dalam konteks kebijakan.

## **BAB III**

### **METODE KAJIAN**

#### **A. Metode Kajian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif. Kekuatan utama dari data kualitatif adalah bagaimana data kualitatif mampu menyajikan makna yang lebih dalam daripada data kuantitatif. Data kualitatif mampu menggali informasi yang lebih dalam baik dalam tataran individu maupun kelompok.

#### **B. Aspek Kajian**

Adapun aspek kajian partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo ini adalah sebagai berikut:

- (a) Penggunaan hak pilih pada Pemilu Serentak Kabupaten Karo 9 Desember 2020: (1) Penggunaan hak pilih; (2) Pertimbangan untuk memilih; (3) Penetapan waktu memilih; (4) Alasan tidak menggunakan hak pilih
- (b) Terpaan Informasi Mengenai Kegiatan Pemilu pada Pemilih: (1) Sumber Informasi tentang Pemilu; (2) Medium sosialisasi yang pernah diikuti;
- (c) Faktor pengaruh untuk memilih atau tidak memilih: (1) Kondisi demografis daerah; (2) alasan menggunakan atau tidak menggunakan hak pilih; (3) ketercukupan dana sosialisasi

#### **C. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *focus group discussion* (FGD). Focus group discussion dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dari sudut pandang pada tingkat:

1. Masyarakat pemilih, terutama pada daerah dengan tingkat partisipasi tertinggi dan terendah di Kabupaten Karo.
2. Penyelenggara di tingkat kecamatan hingga penyelenggara di tingkat kelurahan/desa dengan tingkat partisipasi tertinggi dan terendah di Kabupaten Karo.

#### **D. Teknik Analisa Data**

Analisa data kualitatif dari sudut pandang pemilih dan penyelenggara pemilu untuk menggali lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Karo.

## BAB IV

### HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

---

#### A. Gambaran Umum: Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kabupaten Karo

---

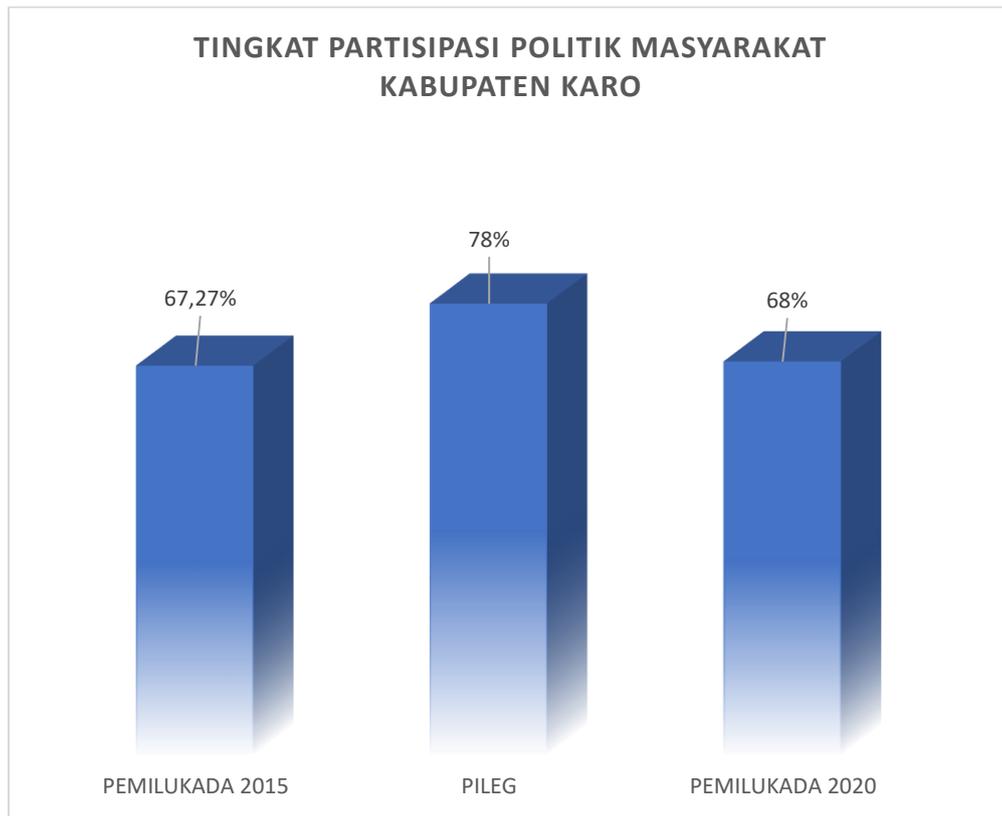
Tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Karo dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 menunjukkan adanya partisipasi yang baik, ditandai dengan tingginya tingkat keikutsertaan masyarakat dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Partisipasi politik menjadi bahasan penting dalam pemilihan kepala daerah karena partisipasi politik menjadi tolak ukur legitimasi sebuah proses pemilihan umum.

Dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemudian melakukan berbagai upaya sosialisasi untuk mendongkrak minat masyarakat untuk hadir ke TPS. Dikutip dari jurnal KPU, beberapa upaya yang boleh dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih adalah, 1) menyusun strategi komunikasi dan teknis guna mendorong minat serta memberi kemudahan pelayanan pemberian suara, 2) penyelenggara dapat memaksimalkan sosialisasi secara daring dengan berbagai *platform* media sosial, dan 3) penyelenggara dapat memberikan insentif kepada pemilih dengan pemberian masker saat datang ke TPS sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan pemilih.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menetapkan angka 77,5 persen sebagai patokan dasar tingkat partisipasi masyarakat. Di tengah kondisi pandemi covid 19, penetapan angka sebesar ini tentu memunculkan banyak pertanyaan tentang kemungkinan masyarakat untuk hadir memilih di TPS. Angka partisipasi politik di Kabupaten Karo sendiri menunjukkan tingkat partisipasi yang baik. Dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karo, 10 di antaranya mencapai angka partisipasi di atas 70 persen. Namun belum ada kecamatan di Kabupaten Karo yang memenuhi target nasional sebesar 77,5 persen. Total persentase partisipasi politik PIKADA di Kabupaten Karo mencapai 68 persen.

Jika dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah tahun 2015, angka ini menunjukkan adanya sedikit peningkatan dari sebelumnya mencapai 67,27 persen. Akan tetapi bila dibandingkan dengan persentase partisipasi dalam pemilihan legislatif yang berlangsung tahun 2019 yang mencapai 78 persen, hal ini menunjukkan adanya penurunan partisipasi politik masyarakat dalam pemungutan suara.

Grafik 1. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Karo

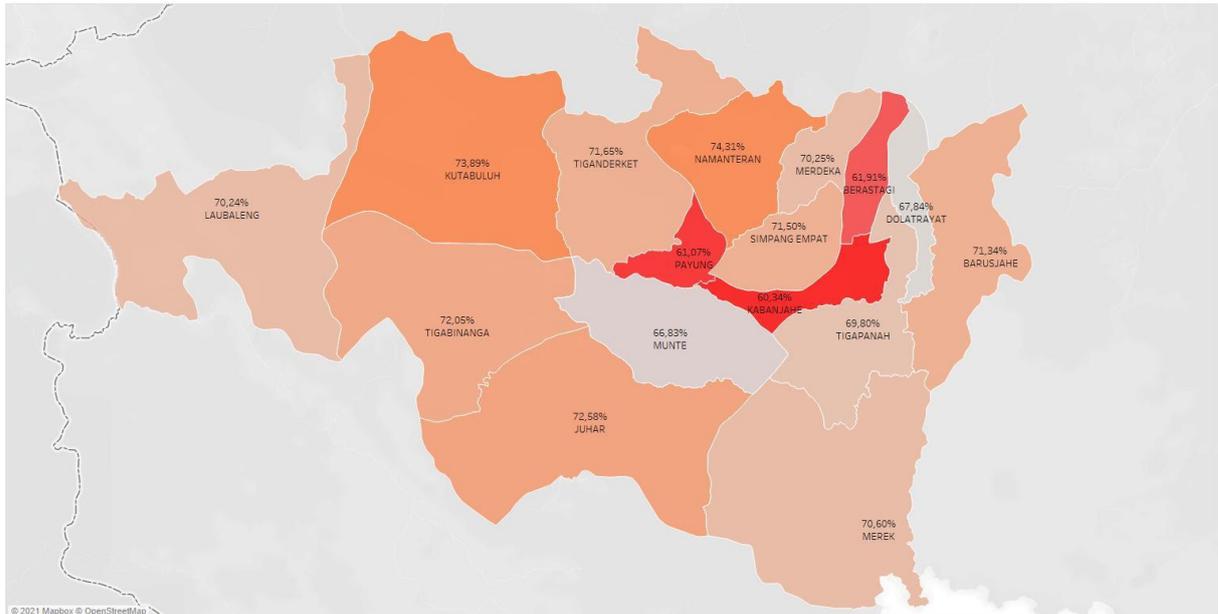


Sumber: Data KPU KARO

Pada pemilihan kepala daerah tahun 2020, tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Karo mencapai angka di atas 60 persen. Tercatat 10 daerah dengan persentase di atas 70 persen, yaitu Kecamatan Barusjahe, Kecamatan Juhar, Kecamatan Kutabuluh, Kecamatan Lau Baleng, Kecamatan Mardinding, Kecamatan Merek, Kecamatan Namanteran, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Tigabinanga, dan Kecamatan Tiganderket.

## Grafik 2. Peta Partisipasi Masyarakat Kabupaten Karo dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020

PETA PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KABUPATEN KARO DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020



Sumber: Hasil Olah Data Peneltii dari Hasil Rekapitulasi KPU KARO

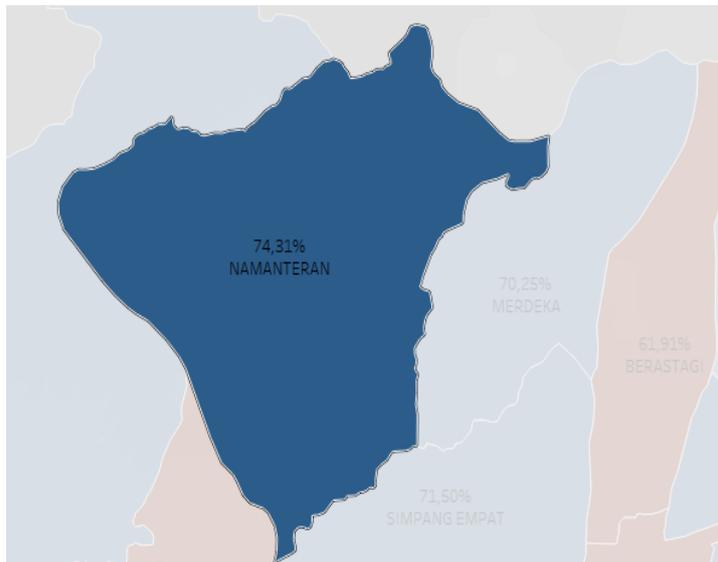
Berikut disajikan data lengkap hasil rekapitulasi dari KPU Karo berdasarkan data jumlah pemilih dan jumlah pengguna hak pilih di Kabupaten Karo.

Tabel 1. Data Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Karo Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Pemilih DPT+DPTb	Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTb+DPPH)	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat
1.	Barusjahe	17723	12643	71,34 %
2.	Berastagi	33540	20764	61,91 %
3.	Dora	6723	4561	67,84 %
4.	Juhar	10873	7892	72,58%
5.	Kabanjahe	50237	30313	60,34%
6.	Kutabuluh	8956	6618	73,89%
7.	Lau Baleng	13843	9723	70,24%
8.	Mardinding	12862	9217	71,66%
9.	Merek	14710	10385	70,60%
10.	Merdeka	10344	7267	66,83%
11.	Munte	16322	10908	66,83%
12.	Namanteran	9892	7315	74,31%
13.	Payung	9233	5693	61,07%
14.	Simpang Empat	16155	11551	71,50%
15.	Tigabinanga	15628	11260	72,05%
16.	Tiganderket	10681	7653	71,65%
17.	Tigapanah	24313	16970	69,80%

Sumber: KPU Kabupaten Karo 1

Grafik 3. Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Namanteran

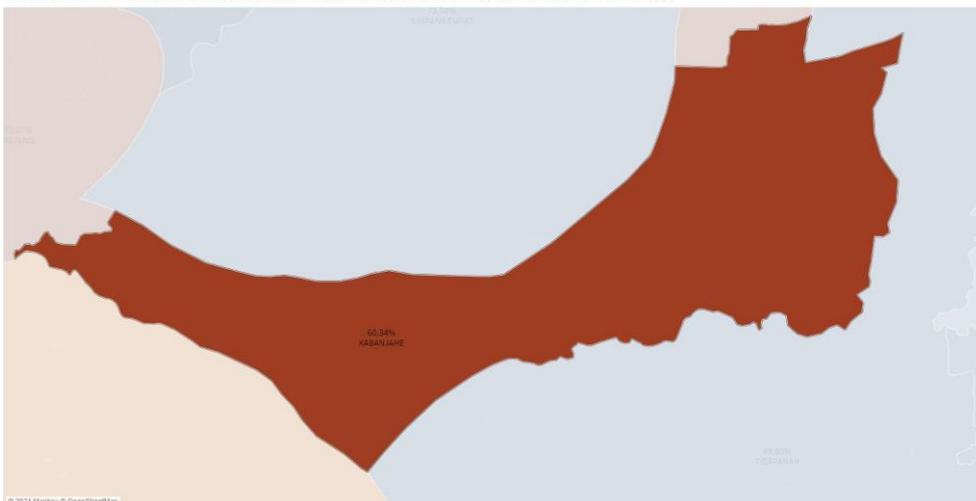


Tingkat partisipasi tertinggi ada di Kecamatan Namanteran dengan persentase sebanyak 74,31 persen, 3,19 persen di bawah target nasional yang ditetapkan. Kecamatan Namanteran merupakan salah satu kecamatan yang terkena imbas meletusnya Gunung Sinabung di Tanah Karo. Wilayah

ini berada dalam radius 5 kilometer dari kaki Gunung Sinabung, Erupsi Gunung Sinabung yang sudah berlangsung sejak tahun 2010 telah mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Namanteran, baik secara ekonomi, sarana dan prasarana, sosial, hingga politik.

Grafik 4. Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Kabanjahe

PETA PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KABUPATEN KARO DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020



Tingkat partisipasi politik terendah ada di Kecamatan Kabanjahe yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Karo sebesar 60,34 persen. Kecamatan ini berbatasan

langsung dengan Kecamatan Tigapanah, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Payung, dan Kecamatan Berastagi. Dari empat wilayah yang berbatasan langsung, Kecamatan Payung dan Kecamatan memiliki tingkat partisipasi politik yang tidak jauh berbeda dengan Kecamatan Namanteran. Tingkat partisipasi politik di Kecamatan Berastagi hanya mencapai 61,91 persen, dan Kecamatan Payung sebesar 61,07 persen. Adapun Kecamatan Simpang Empat mencapai tingkat partisipasi sebesar 71,50 persen.

---

## B. Temuan Hasil

---

### 1. Terpaan Informasi tentang Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Karo

Terpaan sosialisasi pada calon pemilih memiliki peran penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Sosialisasi merupakan bagian penting untuk mewujudkan proses demokrasi yang ideal. Terpaan sosialisasi turut menentukan keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.

Informasi mengenai waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah mempengaruhi tingkat partisipasi warga untuk dapat ke TPS. Masyarakat perlu mendapatkan kejelasan waktu pelaksanaan pemilihan sehingga dapat mengalokasikan waktu untuk hadir di TPS pada tanggal yang telah ditentukan. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak di beberapa wilayah di Indonesia dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Masyarakat sudah mengetahui rencana kegiatan ini sejak jauh hari.

Pandemi covid mengakibatkan adanya pembatasan dalam pelaksanaan sosialisasi. Jumlah peserta yang hadir dibatasi, mobilisasi tim sosialisasi juga turut dibatasi. Lokasi yang sering digunakan untuk sosialisasi di antaranya adalah mesjid, gereja, juga pasar tradisional (pajak). Tim sosialisasi juga melakukan sosialisasi dengan membuat pengumuman di warung-warung kopi. Dana yang dihabiskan dengan durasi dua bulan masa sosialisasi mencapai 10-11 juta rupiah. Untuk memaksimalkan sosialisasi di era pandemi, kemudian digunakanlah kanal di media sosial sebagai alternatif utama.

Informasi mengenai waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini diperoleh melalui beragam kanal informasi. **Sosial media** menjadi *platform* yang secara aktif menyebarkan informasi mengenai pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Karo. Khalayak, terutama kelompok muda menggunakan media sosial untuk mendapatkan terpaan kampanye politik, mengikuti pemberitaan mengenai aktivitas yang dilakukan oleh KPU ataupun kandidat. Penggunaan sosial media sebagai medium pencarian informasi populer di kalangan usia muda.

Perubahan demografi telah mengambil peran besar dalam peningkatan populasi pengguna internet selama beberapa dekade waktu terakhir, yang pada akhirnya menjelaskan pula perubahan yang terjadi dalam penggunaan internet sebagai bagian dari komunikasi politik. Data sensus 2020 menunjukkan bahwa secara nasional dari 270,20 juta penduduk Indonesia, komposisi generasi terbesar diisi oleh *Gen Z* yang lahir pada rentang 1997-2012 dengan persentase sebanyak 27,94 persen, *Milenial* yang lahir pada rentang 1981-1996 dengan persentase sebesar 25,87 persen, dan

Grafik 5. Komposisi Penduduk Indonesia



Gen X yang lahir pada rentang 1965-1980. Adapun generasi yang lahir pada rentang tahun 1946-1964 yang biasa disebut sebagai *Baby Boomer* hanya mencapai 11,56 persen. Hal ini menunjukkan bahwa memang telah terjadi pergeseran komposisi penduduk di Indonesia yang kemudian juga mempengaruhi peningkatan penggunaan internet sebagai medium pencarian informasi, termasuk informasi mengenai aktivitas politik kandidat.

Secara lebih spesifik, media sosial yang sering menyampaikan informasi terkait pemilihan kepala daerah adalah,

1) akun youtube KPU Karo yang berisi ajakan untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah, 2) akun facebook KPU Karo yang secara konsisten memberikan pengumuman dalam bentuk foto maupun video tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, 3) Instagram KPU Karo. Umumnya, masyarakat yang terkena terpaan informasi melalui media sosial adalah kelompok pemilih muda ataupun pemula. Beberapa akun facebook yang diakses adalah akun resmi KPU Kabupaten Karo, akun facebook pribadi komisioner KPU, akun tim sukses, dan grup facebook seperti “Karo News”, dan grup “Kita Kalak Karo”.

**Alat peraga kampanye** berupa spanduk dan selebaran. Spanduk umumnya dipasang di lokasi yang mudah untuk dilihat warga, seperti di sepanjang jalan raya, pasar tradisional, maupun jambur. Secara umum warga lebih banyak terekspose spanduk tentang kandidat daripada spanduk dari KPU. Selain spanduk, masyarakat juga mendapatkan informasi dari selebaran yang ditempel di gang-gang ataupun *kede kopi*. Alat peraga kampanye ini tidak hanya mengekspose kelompok pemuda, namun juga kelompok pemilih bapak-bapak yang sering minum dan mengobrol di *kede kopi*. Selain itu warga juga mendapatkan kalender, *hand sanitizer*, hingga masker yang diberikan langsung oleh tim sukses kandidat.

Di beberapa daerah seperti Kota Medan berita di media cetak tidak menjadi alat terpaan utama, akan tetapi hal ini berbeda dengan kondisi pada masyarakat Karo. **Media cetak** menjadi salah satu sumber informasi yang sering dikonsumsi oleh masyarakat terutama kelompok laki-laki

dewasa. Media cetak yang dibaca diantaranya adalah Metro 24, dan Harian SIB. Di era digital seperti sekarang ini surat kabar dikategorikan sebagai media konvensional, karena keterbatasan dalam penyebaran informasi. Surat kabar kemudian harus bersaing dengan internet yang banyak dikonsumsi oleh generasi muda. *Baby boomers* menjadi konsumen utama surat kabar. Secara spesifik jika dilihat berdasarkan jenis kelamin maka pembaca surat kabar umumnya adalah laki-laki. Dalam konteks komunikasi politik membaca surat kabar sering diasosiasikan dengan pengetahuan yang tinggi mengenai isu-isu publik.

Media lain yang juga banyak memberikan informasi mengenai pemilihan kepala daerah di Kabupaten Karo adalah **televisi**, terutama televisi lokal. Televisi lokal yang bersiaran di Kabupaten Karo adalah Efarina TV. Efarina TV menyiarkan berita tentang kegiatan kampanye yang dilakukan oleh kandidat dalam program berita lokal, kunjungan dari kandidat, hingga debat kandidat. Tidak hanya tentang kandidat, masyarakat juga pernah melihat berita tentang kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karo hingga kegiatan PPK. Efarina TV merupakan stasiun televisi lokal yang banyak menyiarkan konten-konten budaya lokal bagi masyarakat. Lokalitas isu menjadi salah satu poin yang menguntungkan bagi stasiun televisi lokal, ditambah dengan adanya dependensi yang tinggi dari khalayak untuk mengetahui figur kandidat yang akan menjadi kepala daerah.

Hal unik dari penyebaran informasi terkait pemilihan kepala daerah di Kabupaten Karo adalah keberadaan warung kopi atau dalam bahasa lokal disebut sebagai ***kede kopi***. *Kede kopi* menjadi salah satu medium komunikasi yang efektif untuk menyebarkan informasi tentang pemilihan kepala daerah. Di tempat ini, masyarakat -terutama- pemilih laki-laki dewasa atau biasa diistilahkan *bapak-bapak* berkumpul dan berdiskusi tentang berbagai persoalan termasuk persoalan politik. *Kede Kopi* juga sering menjadi tempat bagi relawan ataupun timses untuk mengkampanyekan kandidat yang didukung. Metode yang dilakukan oleh timses salah satunya adalah dengan membayari minuman atau rokok dari warga yang sedang duduk di *kede kopi*.

**Kunjungan tim sukses (timses)** tidak hanya dilakukan di *kede kopi*. Tidak jarang timses juga melakukan kunjungan hingga ke rumah-rumah warga. Apabila di *kede kopi* timses membayari minum dan rokok warga, maka pada saat kunjungan ke rumah timses berupaya mendekati dan mengajak warga untuk ikut memilih dengan cara membagikan sirih sambil mengobrol ringan dengan tuan rumah. Timses juga kerap membagikan sembako kepada warga yang mereka kunjungi. **Aparat desa** juga berperan untuk mensosialisasikan tentang waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah, hingga tahapan-tahapan dalam pemilihan. Kantor desa juga dijadikan sebagai lokasi pemasangan spanduk, selebaran, hingga sticker sosialisasi dari KPU Karo.

Medium komunikasi lain yang dinilai banyak berperan dalam kegiatan sosialisasi adalah **penggunaan mobil keliling** yang menyampaikan pengumuman mengenai kegiatan seputar pemilihan kepala daerah di Kabupaten Karo. Aktivitas ini terutama digencarkan menjelang hari H pemungutan suara. Masyarakat Karo juga masih mendengarkan **siaran radio** sebagai sarana untuk mendapatkan informasi. Stasiun radio yang didengarkan adalah RBK FM, Gray FM, Bayu FM, Irfa FM, dan Ersena FM. Program yang disampaikan melalui siaran radio berupa berita tentang kegiatan KPU, maupun kandidat.

**Tim sukses** juga mengambil peran penting dalam kegiatan sosialisasi. Dari hasil FGD didapati beberapa aktivitas tim sukses yang menyasar langsung khalayak pemilih. Aktivitas tersebut tidak semata untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemilu, namun mempromosikan kandidat kepada calon pemilih. Dalam kegiatan tersebut, tidak jarang tim sukses mendatangi langsung ke rumah warga dengan membawa souvenir, rokok, sirih, ataupun nasi bungkus. Selain rumah penduduk, tim sukses juga tidak jarang menggunakan ladang sebagai tempat untuk mensosialisasikan kandidat yang mereka usung, selain tentunya juga menggunakan rumah pemenangan.

---

## 2. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik di Kabupaten Karo

---

Dengan tingkat partisipasi yang terbilang tinggi, pemilihan kepala daerah di Kabupaten Karo terlegitimasi secara politik. Dari 17 kecamatan, 10 kecamatan mencapai tingkat partisipasi di atas 70 persen. Tingkat partisipasi ini tidak hanya dilihat dari aspek terpaan media kampanye baik dari KPU, tim sukses, maupun kandidat.

Calon pemilih memiliki rasionalisasi tersendiri hingga akhirnya memutuskan untuk memberikan suaranya kepada salah satu kandidat yang berkontestasi dalam pemilihan. Hasil FGD menunjukkan bahwa terdapat beberapa alasan yang mendasari keputusan untuk memilih di Kabupaten Karo.

Memberikan suara merupakan bagian penting untuk menentukan nasib Kabupaten Karo di kemudian hari. Pemilihan kepala daerah diharapkan dapat memberikan perubahan menuju arah yang lebih baik. Rasionalisasi dari pemilih yang kemudian disampaikan adalah,

“kegiatan pemilu hanya terjadi 5 tahun sekali, sayang jika tidak digunakan”.

Pertimbangan lain yang menjadi alasan untuk memberikan suara adalah sudah adanya sosialisasi mengenai pemilihan kepala daerah di baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan. Masyarakat yang memberikan suara biasanya sudah memiliki keputusan untuk memilih sejak awal fase pendaftaran pemilih, hingga saat sudah ada penetapan calon kandidat. Secara umum terdapat 4 faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Karo.

Grafis 6. Faktor Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Karo



Sumber: Olah Data Penelitian

### 1. “Empat Siku” menjadi Daya Dorong Utama Partisipasi Politik

Politik uang selalu menjadi pembicaraan dalam pemungutan suara di Indonesia. Keberadaannya seringkali dianggap sebagai hal yang lumrah dalam proses politik di Indonesia. Hasil survei dari Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan bahwa 40 persen masyarakat Indonesia menerima uang dari peserta pemilu di tahun 2019. Hasil survei dari Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) yang dilakukan di Yogyakarta menunjukkan bahwa sebanyak 42 persen masyarakat menganggap politik uang sebagai hal yang lumrah.

Hal ini juga berlaku di Kabupaten Karo. Praktek bagi-bagi uang terutama oleh kandidat terjadi walaupun menurut PPK maupun PPS tidak ada yang tertangkap basah.

Hasil temuan dalam FGD dengan masyarakat pemilih, didapatkan informasi mengenai tim sukses mendatangi ke rumah warga, tidak jarang juga mendatangi warga saat berada di ladang. Nominal yang diterima warga berkisar antara Rp. 100.000 – Rp. 150.000. Masyarakat memberi istilah rahasia untuk menyamarkan *money politics* dengan istilah “Empat Siku”. Empat Siku merujuk pada bentuk uang kertas yang memiliki empat siku. Selain dalam bentuk uang, *money politic* juga diberikan dalam bentuk sembako, masker, membayarkan minum di *kede kopi*, memberikan siriw kepada *nande (ibu-ibu)*, hingga bentuk pemberian lain seperti topi, baju, dan masker. Pihak penyelenggara pemilu terutama di kecamatan dan desa tidak menaruh perhatian terhadap praktek *money politic* yang terjadi di masyarakat, dikarenakan sudah disibukkan dengan aktivitas sosialisasi dan belum menemukan kasus OTT.

“OTT belum tahu ada. Memikirkan persoalan teknis di PPK/PPS saja sudah penat tidak sempat memikirkan persoalan faktor X tadi”.

Persoalan *money politic* juga erat kaitannya dengan keberadaan pengungsi dari desa-desa yang terkena bencana erupsi Gunung Sinabung. Ada mobilisasi terhadap warga pengungsi yang sebelumnya tersebar di berbagai lokasi. Jarak antara TPS dan desa jauh, namun warga mau datang untuk memilih karena disediakan “pengganti transport”.

Pada umumnya di desa Kec. Naman Teran khususnya kami pengungsi karena kami tersebar di mana-mana ada yang di Binjai, Stabat (karena kami pengungsi mandiri). Pengungsi mandiri yang tinggal ada 5 kecamatan(?). Titik TPS, ada 4 kampung dan 4 lokasi. Jarak TPS dan desa yang jauh, pemilih tergerak karena keinginan sendiri dan “katanya ada yang memobilisasi”.

## 2. Keekerabatan dengan Kandidat

Faktor keekerabatan juga menjadi penentu dalam partisipasi politik di Kabupaten Karo. Sistem keekerabatan yang dimaksud bukan dalam bentuk kesamaan marga semata, namun karena ada hubungan keekerabatan adat, ataupun keekerabatan karena perkawinan, hingga kesamaan desa asal (kampung halaman). Dalam aturan adat tidak ada pengaturan soal dukungan kepada kandidat tertentu, namun pemilih sendiri yang membuat rasionalisasi berdasarkan hubungan keekerabatan yang terjalin dengan kandidat.

Sistem keekerabatan menggambarkan struktur sosial dari masyarakat. Dalam sistem keekerabatan dikenal istilah keluarga inti, dan keluarga besar. Sistem keekerabatan di

negara-negara berkembang seperti Indonesia akan berkenaan dengan sistem budaya, sistem agama, hingga sistem politik.

Sistem kekerabatan Karo menggambarkan kedekatan masyarakat Karo dengan keluarganya, yang menunjukkan bahwa masyarakat Karo tidak akan pernah lepas dari keluarganya dalam berbagai aspek. Sistem kekerabatan seperti kalimbubu dan anak beru mempengaruhi banyak aspek, termasuk aspek politik di masyarakat Karo.

### 3. Dialog Tatap Muka dengan Calon Pemilih

Kampanye luar ruang merupakan metode yang cukup efektif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang informasi politik. Akan tetapi dialog tatap muka langsung juga memainkan peran untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dalam masa pandemi covid 19, banyak batasan terkait pelaksanaan dialog tatap muka.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 13/2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Non Alam Virus Covid 19 pada pasal 57 disebutkan bahwa kampanye dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah pertemuan tatap muka dan dialog, pertemuan terbatas, debat terbuka, serta penyebaran bahan kampanye umum. Pada pasal 58 ayat 1 disebutkan secara spesifik bahwa peserta Pilkada, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain mengutamakan metode kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf a dan huruf b dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring. Apabila para peserta Pilkada 2020 tidak dapat melakukan melalui media sosial, kampanye pertemuan terbatas boleh dilakukan secara langsung. Kendati begitu, KPU mengatur pertemuan terbatas hanya boleh dihadiri maksimal oleh 50 orang dengan menerapkan protokol kesehatan.

Dalam pelaksanaannya, metode dialog tatap muka ini dilakukan dengan kunjungan langsung ke rumah calon pemilih. Metode ini terutama dilakukan oleh tim sukses kandidat. Kandidat dinilai lebih memiliki kelapangan untuk melakukan sosialisasi daripada penyelenggara pemilu. Hal ini dikarenakan ada begitu banyak batasan terkait pelaksanaan pemilu di masa pandemi covid 19 bagi penyelenggara, ditambah dengan adanya

keterbatasan dana. Tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Karo dinilai tidak semata bersumber dari sosialisasi oleh KPU, namun dikarenakan peran besar dari kandidat dan tim sukses kandidat.

Partisipasi pemilih itu tentu dari pasangan calonnya, di Kabupaten Karo ada 5 sehingga ada 5 paslon. Tahapan-tahapan mulai dari ke rumah-rumah, durasinya itu diperbanyak kalau PPDP hanya sebulan dengan sekian ratus KK yang harus ditemui apalagi masyarakat sulit ditemui saat pagi ke siang hari. Petugas kita sedikit dan kewalahan karena mereka harus sampai berkali-kali baru bisa bertemu dengan masyarakat untuk pengumpulan KK.

Metode yang sering digunakan oleh tim sukses kandidat adalah dengan mendatangi langsung rumah calon pemilih untuk mengobrol ringan, dan tidak jarang diakhiri dengan pemberian beras atau sembako.

#### 4. Terpaan Informasi Mengenai Pemilihan Kepala Daerah

Masyarakat di Kabupaten Karo banyak mendapatkan terpaan informasi mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tahun 2020. Terpaan tersebut berasal dari dua sumber, yaitu penyelenggara pemilu dan kandidat pasangan calon.

Grafis 7. Terpaan Informasi pada Pemilih di Kabupaten Karo



Sumber: Olah Data Penelitian

Secara umum tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara terpaan yang diterima pemilih dari penyelenggara pemilu maupun kandidat. Hanya saja, aktivitas untuk memberi terpaan pada masyarakat dari penyelenggara pemilu mendapat pembatasan. Pembatasan berkaitan dengan kondisi pandemi covid 19 yang membatasi aktivitas pengumpulan massa, pengaturan protokol kesehatan yang ketat jika ada pengumpulan massa, sampai pembatasan anggaran sosialisasi.

Dialog yang melibatkan calon pemilih hanya boleh dilakukan maksimal sampai 50 orang dengan protokol kesehatan yang ketat. Dana sosialisasi juga dibatasi hanya Rp.10.000.000 dipotong pajak yang dirasa merepotkan penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa, serta durasi sosialisasi yang terbatas.

Selama ini, sudah pasti kurang dananya, tetapi kami tetap sosialisasi di Masjid, Gereja, pajak, dsb. Kami juga melakukan sosialisasi dengan membuat pengumuman ke warung-warung kopi. Dana sekitar 10-11 juta untuk durasi dua bulan dan dipotong pajak.

Sebagai masukan, terkait pemotongan dana karena adanya pajak menjadi salah satu kendoran kinerja baik dari petugas PPDP, PPK, PPS.

Bila anggaran tetap ditentukan seperti biasa maka tidak ada inovasi dalam sosialisasi. SOP nya tidak memungkinkan untuk mengikuti KPU kalau hanya Rp 50.000 sehingga wajarnya adalah Rp 100.000 agar dapat substansinya. Kalau membuat kegiatan yang menumpang tidak akan dihargai oleh masyarakat.

Durasi sosialisasi selama dua bulan. Dari awal tahapan sosialisasi sudah dilakukan bersama dengan tokoh masyarakat, agama, dsb. Kendala kita dengan waktu dan padatnya tahapan, sehingga cara bekerja “yang penting selesai” akhirnya digunakan.

Mengenai tahapan-tahapan dilakukan hendaknya durasi sebulan ada beberapa pertemuan, durasi pertemuan A jangan hanya sekali bisa dua sampai tiga kali, penyampaian sekali itu hanya berefek sekali lewat

Pembatasan durasi, dana, sampai metode sosialisasi dinilai menghambat proses penyampaian informasi kepada masyarakat. Hal ini berbeda dengan ‘sosialisasi’ yang dilakukan oleh kandidat. Meskipun ada banyak pembatasan, dengan ketersediaan tim yang lebih banyak, dana yang lebih besar, serta metode yang beragam, pada kandidat dan tim sukses lebih mudah untuk masuk ke calon pemilih.

Partisipasi pemilih itu tentu dari pasangan calonnya, di Kabupaten Karo ada 5 sehingga ada 5 paslon. Tahapan-tahapan itu mereka mulai dari ke rumah-rumah, durasinya itu diperbanyak, kalau PPDP hanya sebulan dengan sekian ratus KK yang harus ditemui apalagi masyarakat sulit ditemui saat pagi ke siang hari.

---

### 3. Konteks Situasi Partisipasi Politik di Kabupaten Karo

---

#### 1. Pemungutan Suara saat Pandemi

Seperti halnya daerah lain, Kabupaten Karo juga terdampak pandemi covid. Dalam tataran kebijakan, pandemi covid 19 membuat adanya pembatasan-pembatasan terhadap mobilitas manusia, termasuk terkait dengan pemungutan suara yang berpotensi mengumpulkan massa dalam jumlah besar. Kendala terbesar terutama dalam proses sosialisasi. Ruang gerak sosialisasi menjadi lebih terbatas, ditambah ada kekhawatiran terhadap pandemi, terutama di Kecamatan Kabanjahe.

Untuk membantu memaksimalkan proses sosialisasi, maka PPK maupun PPS menggunakan medium media sosial sebagai *platform* untuk mensosialisasikan tahapan-tahapan dalam pemungutan suara.

Pandemi menghambat pergerakan sosialisasi karena tidak boleh banyak yang hadir sehingga terbatas jumlahnya....Kami membuat kegiatan sosial melalui media sosial apalagi dengan adanya Covid-19, sehingga grup media sosial sangat bermanfaat. Kami memilih anak-anak desa yang aktif untuk ikut membantu mensosialisasikan melalui media sosial.

Pelaksana sosialisasi tidak hanya dituntut untuk mensosialisasikan kegiatan pemilihan suara, namun harus memberi penjelasan ekstra mengenai aktivitas pembatasan yang dilakukan selama pemungutan suara.

Adanya pandemi Covid-19 menjadi suatu kendala, ada indikasi yang terpapar Covid-19 di Kecamatan Kabanjahe menjadi kekhawatiran karena masyarakat menjadi takut ke TPS apalagi hampir setiap bulan bertambah korban Covid-19. Dalam keadaan pandemi, kami memberi informasi kepada masyarakat tentang apa itu pandemi, kami juga mengedukasi masyarakat untuk menghindari penyebaran Covid-19 dengan pembatasan berkala.

Berbeda dengan Kecamatan Kabanjahe, pemilih dari Kecamatan Namanteran memiliki tingkat kekhawatiran yang lebih rendah terhadap pandemi. Salah satu faktor yang dinilai cukup berpengaruh adalah rendahnya terpaan informasi mengenai perkembangan kasus covid 19 di Kabupaten Karo. Rendahnya terpaan informasi ini dinilai membuat banyak warga tidak takut beraktivitas dalam kondisi pandemi.

Angka partisipasi pemilih di 2020 meningkat, salah satu faktor tidak keterbukaan informasi oleh pemerintah dan KPU tentang jumlah korban Covid-19, sehingga saat tim KPU melakukan sosialisasi masyarakat tidak takut dan anteng-anteng saja.

Pemilih cukup datang dengan mengikuti protokol kesehatan. Di tempat pemungutan suara telah tersedia desinfektan, masker, *hand sanitizer*, wastafel untuk cuci tangan, hingga bilik untuk pemilih dengan suhu tubuh di atas rata-rata. Selain itu ada linmas yang melakukan pengawasan untuk memastikan pemilih menjaga jarak satu dengan lainnya. Formulir C pemberitahuan juga menyertakan pemberitahuan agar pemilih tidak datang berkerumun.

## 2. *Kede Kopi* sebagai Ruang Publik

Keberadaan *kede kopi* sebagai bagian penting dalam proses politik telah memainkan peranan penting sejak beberapa dekade lalu. ketika Habermas memunculkan konsep Ruang Publik ke permukaan, Habermas telah menyinggung peran *coffee houses* sebagai pusat kehidupan masyarakat.

*The "town" was the life center of civil society not only economicall; in cultural-political contrast to the court, it designated especially an early public sphere in the world of institution were the coffee houses, the salons, and the Tishgesellschaften (table societies) (Habermas, 1989:30)*

*Kede kopi* di Karo umumnya lebih banyak didatangi laki-laki daripada perempuan. Pembicaraan di *kede kopi* umumnya berlangsung dengan lebih informal, dan lebih ringan meskipun topik bahasannya berat seperti politik. *Kede kopi* juga lebih mudah untuk dijangkau masyarakat dari berbagai strata. *Kede kopi* menjadi salah satu sentra pertukaran informasi dan politik pada publik.

Penyelenggara pemilu menggunakan *kede kopi* sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi sekaligus mengajak masyarakat untuk datang ke TPS saat pemungutan suara.

Metode ini dilakukan untuk menyalurkan dana sosialisasi yang terbatas. Anggaran dan sosialisasi Rp.10.000.000 dinilai tidak memadai, ditambah ada potongan pajak. Untuk itu penyelenggara pemilu menyalurkan dengan memberi pengumuman ke *kede kopi*, meskipun tidak ada pemetaan tentang seberapa persen metode tersebut dapat menggugah pemilih untuk datang ke TPS.

Selama ini, sudah pasti kurang dananya, tetapi kami tetap sosialisasi di Masjid, Gereja, pajak, dsb. Kami juga melakukan sosialisasi dengan membuat pengumuman ke warung-warung kopi. Dana sekitar 10-11 juta untuk durasi dua bulan dan dipotong pajak. Sosialisasi itu perlu untuk menarik orang untuk bisa menentukan pilihannya ke TPS.

Metode seperti ini tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Tim sukses kandidat juga menggunakan metode yang sama untuk memengaruhi masyarakat agar mendukung kandidat yang diusungnya. Budaya minum di *kede kopi* menjadi kekhasan budaya terutama laki-laki di Kabupaten Karo. Umumnya, mereka menghabiskan waktu 1 sampai 2 jam untuk minum kopi sambil mengobrol tentang berbagai tema termasuk tema politik. Waktu minum kopi biasanya di pagi hari sebelum ke ladang, ataupun di sore hari setelah kembali dari ladang. Waktu-waktu ini yang kemudian dimanfaatkan tim sukses untuk membahas program dari kandidatnya. Tidak jarang *kede kopi* juga dijadikan sebagai modus untuk *money politic*, dengan cara membayar minuman dari calon pemilih yang ditargetkan.

Akan tetapi, apabila diharuskan untuk mengalokasikan waktu khusus untuk mendapatkan sosialisasi tentang pemungutan suara ataupun program dari kandidat, warga cenderung enggan untuk datang. Hal ini dikarenakan mereka banyak menghabiskan waktunya di ladang untuk mengolah lahan pertanian.

Teh manis, kopi tidak laku disini, karena uang masuk masyarakat di ladang lebih besar, pendapatan perkapita di Tanah Karo lebih tinggi.

### **3. Pengungsi dalam Konstelasi Politik di Kabupaten Karo**

Bencana Sinabung yang terjadi sejak tahun 2010 telah memunculkan banyak masalah sosial, ekonomi, hingga politik pada masyarakat di desa terdampak bencana. Banyak warga yang terpaksa mengungsi karena huniannya hancur terkena awan panas. Hal ini berujung pada relokasi desa-desa terdampak, dan memunculkan fenomena

pengungsi. Beberapa desa direlokasi ke Kawasan Siosar. Di kawasan yang aslinya merupakan kawasan hutan lindung ini, masyarakat harus membangun kembali kehidupannya dari nol, dan menata kembali berbagai aspek ekonomi dan sosial di lingkungan baru tersebut.

Sebagian lainnya menjadi pengungsi mandiri dan tinggal di daerah sekitar Kabupaten Karo seperti Stabat dan Binjai. Pengungsi mandiri ini banyak yang berasal dari Kecamatan Namanteran. Pengungsi mandiri ini tetap datang ke TPS meskipun lokasi TPS jauh dari tempat domisili mereka.

Pada umumnya di desa Kec. Naman Teran khususnya kami pengungsi karena kami tersebar di mana-mana ada yang di Binjai, Stabat (karena kami pengungsi mandiri). Jarak TPS dan desa yang jauh, pemilih tergerak karena keinginan sendiri dan “katanya ada yang memobilisasi” (FAKTOR X).

Fenomena pemanfaatan pengungsi untuk kepentingan politik tidak hanya dialami oleh pengungsi mandiri. Pengungsi yang sudah direlokasi di Kawasan Siosar juga menjadi target dalam upaya pengumpulan suara. Lima calon yang ikut dalam kontestasi banyak melakukan kunjungan ke Kawasan Siosar yang sekarang banyak beralih menjadi kawasan Desa Wisata. Dalam setiap kunjungan, kandidat dapat memberikan souvenir yang berbeda-beda. Ada yang memberikan masker, handsanitizer, hingga sembako sebagai “bentuk kepedulian dari masing-masing calon”.

## BAB V

### SIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Simpulan

1. Tingkat partisipasi politik di Kabupaten Karo dipengaruhi oleh banyaknya praktek *money politic* yang dilakukan oleh kandidat untuk dapat menghadirkan calon pemilih ke TPS. Jenis *money politic* yang diberikan beragam, mulai dari uang, uang pengganti transport, sembako, rokok, sirih.
2. Kekhasan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Karo adalah hubungan kekerabatan yang kuat, baik kekerabatan karena hubungan darah, perkawinan, atau kekerabatan kampung.
3. Dialog tatap muka menjadi unsur penting untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Karo. Kegiatan dialog tatap muka lebih banyak dilakukan oleh perwakilan kandidat atau timses dengan melakukan kunjungan ke rumah-rumah calon pemilih, duduk minum bersama di *kede kopi*, maupun datang langsung ke ladang calon pemilih.
4. Terpaan informasi yang tinggi mengenai kegiatan pemilu baik dari penyelenggara pemilu maupun kandidat yang berkontestasi dalam pilkada juga berkontribusi terhadap tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Karo. Intensitas terpaan informasi pilkada yang berasal dari kandidat lebih kuat daripada terpaan dari penyelenggara pemilu. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dana dan ikatan aturan bagi penyelenggara pemilu mengenai pelaksanaan sosialisasi pemilihan kepala daerah selama masa pandemi covid 19.
5. Terjadi mobilisasi terhadap pengungsi untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Karo. Persoalan ekonomi dan sosial yang sedang dihadapi oleh para pengungsi menjadi daya tarik bagi kandidat untuk melakukan pendekatan dengan memberikan bantuan kepada pengungsi. Pengungsi mandiri didatangkan ke TPS dan diberikan uang pengganti transport.
6. *Kede Kopi* menjadi ruang publik untuk bahasan mengenai kegiatan politik dalam hal ini pemilihan kepala daerah di Kabupaten Karo. Baik penyelenggara

pemilu maupun timses kandidat menggunakan *kede kopi* untuk mensosialisasikan kegiatan pemilihan kepala daerah.

7. Pandemi Covid 19 membatasi kegiatan sosialisasi yang harus dilakukan oleh penyelenggara, namun tidak banyak membatasi sosialisasi dari timses kandidat terutama karena pendekatan yang dilakukan timses banyak dilakukan melalui kunjungan dan dialog tatap muka di rumah ataupun ladang. Penyelenggara pemilu memiliki keterbatasan dana dan personil untuk melakukan sosialisasi secara tatap muka, sementara timses memiliki ruang gerak dan dana yang lebih besar untuk melakukan pendekatan kepada calon pemilih.

## **B. Rekomendasi**

- (1) Terpaan informasi yang tinggi mengenai kegiatan pemilu baik dari penyelenggara pemilu maupun kandidat yang berkontestasi dalam pilkada juga berkontribusi terhadap tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Karo. Kesadaran akan kampanye/sosialisasi Pemilu Kabupaten Karo maupun kampanye kandidat Bupati/wakil Bupati ini perlu diperkuat dengan menyiapkan/menyusun model sosialisasi/kampanye mulai dari penyusunan visi misi program dan outcome kampanye, penentuan segmentasi sampai dengan penentuan medianya.
- (2) *Kede Kopi* menjadi ruang publik untuk bahasan mengenai kegiatan politik dalam hal ini pemilihan kepala daerah di Kabupaten Karo. Baik penyelenggara pemilu maupun timses kandidat menggunakan *kede kopi* untuk mensosialisasikan kegiatan pemilihan kepala daerah. KPU Kabupaten Karo, oleh itu ke depan, perlu menyiapkan/menyusun model sosialisasi/kampanye melalui ruang public yang banyak terdapat di Kabupaten Karo ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel A, Sidney Verba. 1965. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations: An Analytic Study*. Toronto: Little, Brown, cop.
- Almond, Gabriel A, Sidney Verba. 1984. *Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi Politik di Lima Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Babbie, Earl, 2010, *The Practice of Social Research*, Wadsworth Cengage Learning, California
- Budiarjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budhiati, Ida. 2013. *Quo Vadis Demokrasi Prosedural dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 42, (No. 2).
- Creswell, John W, 2014, *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*, SAGE, Los Angeles
- Firmanzah. 2008. *Mengelola Partai Politik (Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Habermas, 1989, *The Structural Transformation of The Public Sphere*, The MIT Press, Masschusetts
- Kaid, Lynda Lee. 2004. *Handbook of Political Communication Research*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers.
- Kantaprawira, Rusadi. 2006. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Nugraha, Harry S. 2018 *Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jurnal Lex Renaissance, Vol. 3, (No. 1).
- Ristyawati, Aprista. 2020. *Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia*. Jurnal Crepido. Vol 02 (No.2).
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1. Notulensi FGD Penyelenggara Pemilu

### NOTULENSI FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Langsung  
Kabupaten Karo Tahun 2020

(Kamis, 15 April 2021)

A. PPK/PPS KECAMATAN KABANJAHE	
PERTANYAAN	TANGGAPAN
1. Bagaimana kondisi penduduk/pemilih di wilayah kerja Anda?	<p>Penduduk atau pemilih banyak datang dari kecamatan lain. Pergerakan penduduk cepat hampir setiap bulannya ada karena banyaknya rumah kontrakan di Kabanjahe. Dari 159 TPS seharusnya ikut berpartisipasi dalam sosialisasi sayangnya masyarakat tidak datang karena kesibukan masyarakat itu sendiri.</p> <p>Salah satu kondisi penduduk di Tanah Karo adalah ARON (buruh lepas). Aron sering tidak menggunakan hak pilihnya karena berkali-kali dikecewakan, harapan mereka tidak menjadi kenyataan. Terkait ARON, mereka cenderung “ada uangnya dulu”. Bila ada uang transport ke TPS dan hari libur baru akan datang menggunakan hak suaranya. Penguasa dan koordinator ARON itu mampu menentukan ARON untuk memilih atau tidak.</p> <p>Terkait ARON, Ada undang-undang yang membantu. Ada yang mengambil C6 pemberitahuan, ada petugas yang datang, ada juga yang di hari H hanya membawa KTP.</p> <p>Masyarakat di Kabanjahe bisa dibilang 2C, Cerdas dan Cadas. Sebelum pemberitahuan C6 masyarakat sudah menanyakan kenapa belum sampai C6 nya. Wilayah sebagian besar sudah melek dengan pemilu. Ada pemilih yang cerdas, ada yang ikut-ikutan karena kepentingan. Kondisi seperti ini bisa memengaruhi partisipasi pemilih. Bila yang cerdas tanpa faktor apapun mereka akan semangat, niat menggunakan hak pilihnya, namun yang ikut-ikutan itu hanya melihat arah angin. Kelompok yang lain itu sangat juga berpengaruh terhadap persentase pemilih di Kec. Kabanjahe.</p> <p>Masyarakat peduli politik (pendidikan politik tinggi) di Tanah Karo. Di Karo sangat sedikit tentang <i>money politic</i>, ia tahu politik dan memilih itu karena ia kenal dengan paslon. Kabanjahe ini sudah melihat latar belakang kandidat, sosok yang mumpuni, kalau pun ada <i>money politic</i> mereka ambil uangnya tapi tidak memilih berdasarkan uang tersebut, tetap sesuai hati nurani. Karakter orang Karo bila dipengaruhi uang tidak tinggi.</p>

	<p>Tingkat kekerabatan hanya berpengaruh bila satu darah langsung dan satu kampung, marga tidak memengaruhi. Masyarakat sudah lebih cerdas untuk melihat <i>track record</i> nya. Harapan kita peserta atau calon dapat lebih giat lagi untuk meningkatkan eksistensinya. Faktor X Kabanjahe ada tapi tidak dominan.</p> <p>Adanya pandemi Covid-19 menjadi suatu kendala, ada indikasi yang terpapar Covid-19 di Kecamatan Kabanjahe menjadi kekhawatiran karena masyarakat menjadi takut ke TPS apalagi hampir setiap bulan bertambah korban Covid-19. Dalam keadaan pandemi, kami memberi informasi kepada masyarakat tentang apa itu pandemi, kami juga mengedukasi masyarakat untuk menghindari penyebaran Covid-19 dengan pembatasan berkala.</p>
<p>2. Apakah Anda pernah mendengar pernyataan dari pemilih mengapa mereka memutuskan menggunakan ataupun tidak menggunakan hak pilihnya?</p>	<p>Beragam alasannya; karena calon yang kurang di hati, tidak ada perubahan dirasakan.</p> <p>Angka partisipasi pemilih di 2020 meningkat, salah satu faktor tidak keterbukaan informasi oleh pemerintah dan KPU tentang jumlah korban Covid-19, sehingga saat tim KPU melakukan sosialisasi masyarakat tidak takut dan anteng-anteng saja.</p>
<p>3. Bagaimana tentang ketercukupan dana maupun peralatan sosialisasi?</p>	<p>Sosialisasi itu masih kurang, sehingga kami dituntut untuk melakukan sosialisasi mandiri. Tingkat partisipasi politik bisa meningkat karena maksimalnya kegiatan sosialisasi. Tahun 2020, anggaran sangat minim tidak menyesuaikan dengan kondisi masyarakat di daerah itu. Anggaran besar, tapi pajaknya juga besar, anggaran Rp 10 juta pajaknya Rp 2 juta. Teh manis, kopi tidak laku disini, karena uang masuk masyarakat di ladang lebih besar, pendapatan perkapita di Tanah Karo lebih tinggi. Bila anggaran tetap ditentukan seperti biasa maka tidak ada inovasi dalam sosialisasi. SOP nya tidak memungkinkan untuk mengikuti KPU kalau hanya Rp 50.000 sehingga wajarnya adalah Rp 100.000 agar dapat substansinya. Kalau membuat kegiatan yang menumpang tidak akan dihargai oleh masyarakat.</p> <p>Dari terakhir kami melaksanakan pilkada itu sudah cukup. Agar lebih maksimal tidak salahnya ditambahin dana, alat peraga kampanye (peralatan) dan waktu sosialisasi untuk di Kecamatan Kabanjahe.</p>
<p>4. Apa saran untuk KPU Karo dalam meningkatkan parmas di pemilu berikutnya?</p>	<p>Durasi sosialisasi selama dua bulan. Dari awal tahapan sosialisasi sudah dilakukan bersama dengan tokoh masyarakat, agama, dsb. Kendala kita dengan waktu dan padatnya tahapan, sehingga cara bekerja “yang penting selesai” akhirnya digunakan.</p>

	<p>Partisipasi pemilih itu tentu dari pasangan calonnya, di Kabupaten Karo ada 5 sehingga ada 5 paslon. Tahapan-tahapan mulai dari ke rumah-rumah, durasinya itu diperbanyak, kalau PPDP hanya sebulan dengan sekian ratus KK yang harus ditemui apalagi masyarakat sulit ditemui saat pagi ke siang hari. Petugas kita sedikit dan kewalahan karena mereka harus sampai berkali-kali baru bisa bertemu dengan masyarakat untuk pengumpulan KK.</p> <p>Sebagai masukan, terkait pemotongan dana karena adanya pajak menjadi salah satu kendoran kinerja baik dari petugas PPDP, PPK, PPS.</p> <p>Mensosialisasikan kandidat dilarang karena disebut memihak, seharusnya itu boleh dilakukan karena tenaga dari luar terbatas menjelaskan tentang setiap paslon. Bila kita bisa sosialisasikan semua kandidat itu sangat memengaruhi partisipasi politik, karena masyarakat tidak mengetahui kandidat tersebut.</p> <p>Mengenai tahapan-tahapan dilakukan hendaknya durasi sebulan ada beberapa pertemuan, durasi pertemuan A jangan hanya sekali bisa dua sampai tiga kali, penyampaian sekali itu hanya berefek sekali lewat. Namun bila bertemu beberapa kali masyarakat bisa terbosesi untuk menceritakan pertemuan tersebut ke tetangga-tetangganya, perlu juga menggunakan tokoh adat agar membantu penyebaran informasi.</p> <p>Orang KPU lebih tahu cara meningkatkan parmas, namun bila orang lapangan yang menjawab ini terkait persoalan dana sosialisasi, bila dana sosialisasinya cukup, para calon pemilih mungkin mencari tahu latar belakangnya seperti apa, visi misinya seperti apa, dsb. Dimulai dari sosialisasi itu sendiri.</p> <p>Saran, perlu adanya desain atau pemetaan mengenai persoalan belum maksimalnya hasil kerja PPDP dalam penyusunan data. Posisi TPS tidak strategis dengan tempat masyarakat sehingga menimbulkan rasa malas, belum lagi persoalan masyarakat tidak masuk ke draft DPT, sehingga mereka merasa tidak dihargai. Persoalan ini memengaruhi ketidakmaksimalnya hasil partisipasi.</p>
<p>5. Apakah ada pengaruh adat dalam menentukan siapa calon Bupati/wakil Bupati yang harus dipilih?</p>	<p>Peran fungsi adat itu, saat kita melakukan sosialisasi dan tokoh adat mengizinkan, memberi kesempatan itu merupakan salah satu peran penting.</p> <p>Ada tapi tidak seberapa besar lagi, pemilih sudah mulai cerdas dalam menentukan bupati. Pengaruh adat</p>

	membantu proses sosialisasi, seperti pesta adat akan memberikan ruang penyampaian sosialisasi kegiatan.
--	---

<b>B. PPK/PPS KECAMATAN NAMAN TERAN</b>	
<b>PERTANYAAN</b>	<b>TANGGAPAN</b>
1. Bagaimana kondisi penduduk/pemilih di wilayah kerja Anda?	<p>Pemilih rasional di Namanteran 25%, apatis 30%. 4 desa mengungsi akibat Sinabung. Pada umumnya di desa Kec. Naman Teran khususnya kami pengungsi karena kami tersebar di mana-mana ada yang di Binjai, Stabat (karena kami pengungsi mandiri). Pengungsi mandiri yang tinggal ada 5 kecamatan(?). Titik TPS, ada 4 kampung dan 4 lokasi. Jarak TPS dan desa yang jauh, pemilih tergerak karena keinginan sendiri dan “katanya ada yang memobilisasi” (FAKTOR X). OTT belum tahu ada. Memikirkan persoalan teknis di PPK/PPS saja sudah penat tidak sempat memikirkan persoalan faktor X tadi.</p> <p>Masyarakat dominan beprofesi sebagai petani.</p>
2. Apakah Anda pernah mendengar pernyataan dari pemilih mengapa mereka memutuskan menggunakan ataupun tidak menggunakan hak pilihnya?	<p>Ada faktor kepentingan salah satunya faktor keluarga dari calon. Ada juga faktor <i>money politic</i> apalagi masyarakat yang mengungsi.</p> <p>Pemilu serentak 2020 lalu sebanyak 83% masyarakat Naman Teran memilih, perlu membuat sosialisasi selanjutnya agar masyarakat tahu pentingnya memilih itu.</p> <p>Sistem pendataan di Namanteran; kami tekankan bahwa PPS harus bekerja sama dengan kepala desa, karena kepala desa yang mengetahui pendataannya. Data pemilih menentukan partisipasi pemilih.</p>
3. Bagaimana tentang ketercukupan dana maupun peralatan sosialisasi?	<p>Pandemi menghambat pergerakan sosialisasi karena tidak boleh banyak yang hadir sehingga terbatas jumlahnya. Kami membuat kegiatan sosial melalui media sosial apalagi dengan adanya Covid-19, sehingga grup media sosial sangat bermanfaat. Kami memilih anak-anak desa yang aktif untuk ikut membantu mensosialisasikan melalui media sosial.</p> <p>Supaya ada perubahan, masyarakat tetap harus memilih, itu yang kami sosialisasikan kepada masyarakat melalui keluarga ke keluarga, tetangga ke tetangga.</p> <p>Selama ini, sudah pasti kurang dananya, tetapi kami tetap sosialisasi di Masjid, Gereja, pajak, dsb. Kami juga melakukan</p>

	<p>sosialisasi dengan membuat pengumuman ke warung-warung kopi. Dana sekitar 10-11 juta untuk durasi dua bulan dan dipotong pajak.</p> <p>Sosialisasi itu perlu untuk menarik orang untuk bisa menentukan pilihannya ke TPS.</p>
<p>4. Apa saran untuk KPU Karo dalam meningkatkan parmas di pemilu berikutnya?</p>	<p>Saran untuk KPU, diperhatikan KPPS hingga PPS dan PPK.</p> <p>Dari pandangan penyelenggara, sudah maksimal namun paling jauh adalah akibat Covid-19 khususnya di lima kelurahan. Ada kegiatan terkait pemilu, sudah dibayangkan dengan protokol kesehatan walaupun pengumpulan massa memang sudah berkurang.</p> <p>Tempat memilih TPS tidak untuk memudahkan pemilih, kami sebagai PPS juga terganggu dengan gaji yang hanya sejuta belum lagi pengeluaran tinggi untuk kegiatan ini.</p>
<p>5. Apakah ada pengaruh adat dalam menentukan siapa calon Bupati/wakil Bupati yang harus dipilih?</p>	<p>Yang menentukan calon bupati adalah partai, bukan pengaruh adat.</p>

## LAMPIRAN 2. Catatan Lapangan FGD Pemilih

### CATATAN LAPANGAN FOCUS GROUP DISCUSSION

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Langsung Kabupaten Karo Tahun 2020

(Kamis, 15 April 2021)

#### Pengetahuan masyarakat mengenai pemilihan kepala daerah Kabupaten Karo

Informasi	Kapan Mengetahui	Sumber Informasi
Tanggal Pelaksanaan	9 desember Mengetahui: januari 2020	Sosial media Teman Televisi: berita Spanduk KPU: Jalan Raya depan Kantor Bupati, Kantor Kepala Desa.
Kandidat Calon Bupati/Wakil Bupati	Setelah pengumuman KPU: Juli	Media Sosial: FB siaran langsung, KPU Spanduk KPU Koran Tv: Efarina, Radio: Gray
Pendataan Pemilih	2020: Mei	Setelah didata: PPDP didampingi oleh PPS Pengumuman DPT: November Pendataan 2 x: DPS dan DPT

#### Dalam menentukan hak pilih terkait

Memilih atau tidak	Pertimbangan	Kapan memutuskan	Faktor yang mempengaruhi
Memilih	-Menentukan nasib 5 tahun kedepan: Malu Tidak Memilih -PPK dan PPS memberikan sosialisasi untuk memilih - Keputusan pribadi	-Selalu memilih dalam pemilu -Setelah mengetahui calon	- Prinsip - Faktor ikatan keluarga -Ada dana dukungan 200k 150k 100k Sembako Sirih: tim sukses Topi Baju
Tidak Memilih	-Calon kandidat meninggal -Keputusan pribadi	-Setelah menentukan calon - Hasil diskusi keluarga	-Calon bukan orang yang mendukung -Kerja (keluar kota) -Tidak ada dana dukungan - Tidak ada perubahan

## Sosialisasi

Medium Sosialisasi	Pernah ada atau tidak*	Lokasi
Spanduk	Pernah: Timses, KPU	Setiap persimpangan Jalan besar Gang Fasilitas Umum: Angkot Becak
Dialog tatap muka	Ada: kelima calon berkunjung 1 bulan sebelum pemilu	Kampanye: Mengingat tanggal pilkada Memberikan masker handsanitizer Sembako: kepedulian 5 calon berkunjung, tapi berbeda tiap desa, Ada juga desa yang tidak didatangi: jalan tidak mendukung Desa: Siosar terbanyak: Desa wisata
Kunjungan relawan/timses	Ada: mengingatkan, berbagi Warkop; membayar minum dan rokok ke rumah: berdiskusi, memberikan sirih, sembako Menunju pilkada: 1 hingga 2 kali Mulai tim dibentuk sudah mulai bersosialisasi dan berkunjung Berkisar 3 bulan sebelum pilkada Pesta Tahunan: kampanye dan sosialisasi, nyawer	Disetiap desa ada timses: 14 Desa
Berita di TV	Ada: Efarina: berita lokal Kampanye Kunjungan Debat Semua calon pernah diberitakan di efarina TV Berita KPUD PPK	Efarina TV
Kalender/Stiker/Poster	Ada: Timses membagikan	Dirumah Warkop/ kede kopi Jalanan

	Poster: meminta izin (dirumah) dan tanpa izin juga dirumah Tanpa izin: diladang, pohon, tiang listrik	Stiker: dimobil, motor, kamar mandi umum desa (dengan izin) Kalender: rumah, kede kopi
Berita Online	Ada: Karo news: (sumber medsos: kemudian klik link)	Karo News: kegiatan calon: Dari calon, KPU
Facebook	Ada, postingan oleh timses, calon, keluarga, teman Mengingatkan jangan lupa untuk memilih Memberitahukan visi misi: timses Foto bersama calon ataupun timses Alur pemilihan di TPS	Kunjungan Sosialisasi Bantuan dampak bencana alam
Iklan di TV	Ada, Semua calon ada iklan: visi misi, Iklan KPU: Ada: mengajak untuk memilih: Mela La Milih (malu jika tidak memilih) Running text: mengajak untuk memilih: ada di acara selain berita	Iklan sore dan malam pulang bekerja: mulai 19.00)
Berita di Koran	Ada, semua calon dan KPU: Kegiatan, sosialisasi KPU mengingatkan untuk ke KPU, syarat-syarat	Metro 24 SIP (setelah penetapan calon)
Iklan di Koran	Ada, Semua calon dan KPU Calon: visi misi, kunjungan KPU: jadwal	Metro 24 SIP (setelah penetapan calon)
Iklan di Radio	Ada, calon dan KPU Calon banyak iklan	RBK, Gray, Bayu, Ratu, Ersena Pagi, siang, malam. Segmentasi: iklan Isi iklan: Lagu dan Calon mengutarakan visi misi serta mengajak untuk memilih
Berita di Radio	Ada,	Kegiatan kampanye, mengajak dan mengingatkan kegiatan.

		Kegiatan debat, KPU RBK, Gray, Ratu, ersena
Dialog di Radio	Calon: Ada KPU: Tidak ada	Kegiatan Tanya jawab, visi, misi, kampanye Ada yang setiap saat Ada yang hanya malam
Dialog di TV	Calon: Ada Debat calon Talkshow	Efarina Jam 7 malam
Whatsapp	Ada; keluarga, Grup dan pesan pribadi Isi: mengajak “mela la milih” oleh saudara ataupun teman	Video, foto, poster
Artikel di Koran	Ada: profil, istilah: 5 calon KPU: tidak ada	Metro 21 SIP
Twitter	Tidak menggunakan twitter	
Youtube	Ada oleh channel timses, hanya beberapa upload kegiatan, visi misi, KPU; tidak diakses	
Instagram	Akun @kalakkaro, foto, video, poster: Visi misi	
Lainnya	Nyawer, menyediakan soundsistem dalam kegiatan pesta tahun	

### **Pandemi mempengaruhi atau tidak untuk datang ke TPS**

Ya (tidak datang ke TPS)	Tidak (datang ke TPS)
Kunjungan ke rumah untuk mengambil suara dan diikuti dengan saksi. Didukung dengan laporan keluarga. KPPS, PPS dan saksi ( 5 orang ) ; sebelum jam 1 siang; 1 / 2 orang	Mengikuti prokes karena disediakan sarana untuk menjalankan prokes; disinfektan, masker, handsanitizer, cuci tangan
	Disediakan bilik khusus untuk orang dengan suhu tubuh diatas rata2
	Menggunakan hak pilih/prinsip
	Tanggung jawab dana dukungan / serangan fajar
	Kondisi fisik yang mendukung

LAMPIRAN 3. Daftar Hadir FGD

ABSENSI FGD RISET PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG  
KABUPATEN KARO TAHUN 2020

Hari/Tanggal : Kamis, 15 April 2021  
 Jenis FGD : Kecamatan Kebanjaha  
 Fasilitator : Farida Hanim  
 Co-Fasilitator : Claudia Anastasya

No	Nama	Alamat	No. Handphone	Tanda Tangan
1.	Akhrul Eki Susanto Ginting	Lau Cimba (Kebanjaha)	08537324459	
2.	Felicia Br Ginting	Lau Cimba (Kebanjaha)	082161519406	
3.	Rani Br Tarigan	Lau Cimba (Kebanjaha)	0823 6894 8515	
4.	Eva Permata Sari br Meliala	Lau Cimba (Kebanjaha)	0821-6552-4026	
5.	Jhor Elkaman Ginting	Lau Cimba (Kebanjaha)	—	
6.	Eudang Dwi Sunaini	Kampung Dalam (Kebanjaha)	—	
7.	Angel Negrita	Kampung Dalam (Kebanjaha)	—	
8.	JURI Tama Janella S	SUMBER MOTAKAT (Kebanjaha)	0812 62141112	
9.	WAKTU SEMBINGAS	RUMAH KARBON JAHÉ	0812 6557 629	
10.	Perdana Tarigan	Desa kandibata	0823 706 87853	
11.	KASPUL Tarigan	Desa kandibata	0812 6406 8647	
12.	ELISA Tarigan	DS. KANDIBATA	0813 6686 6971	

**ABSENSI FGD RISET PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG  
KABUPATEN KARO TAHUN 2020**

Hari/ Tanggal : Kamis, 15 April 2021  
 Jenis FGD : Kecamatan Naman Terah  
 Fasilitator : Nur Fitriyani  
 Co-Fasilitator : Tri Nova Ginting

No	Nama	Alamat	No. Handphone	Tanda Tangan
1.	Abib Prasani Maria br.G	Sukonau	0813 288 7660	
2.	ERUINA br.gty	Sukanan	0 82289530144	
3.	HIT pi Hagana	Sukanau	0813 7030 8003	
4.	Kristiani br. ginting	Sukonau	0823 65 65 3749	
5.	Yobi SITEPU	SINACEN/SOSAR	0812 7136 5768	
6.	RIFALDI PRATAMA	Siganung-gantung	0882 - 6117 - 5895	
7.	BILLY AFIDHA SURB	SINACEN	0852 7679 3169	
8.	SEMANGATI STEPU	SIGERANG-GARANG	0822 72683011	
9.	SUHANTI FLORIDA BR.B	SUKANAU	0838 7884 4236	
10.	PONDAR Ngaleniga br. S	SUKANAU	0821 6050 92-68	

**ABSENSI FGD RISET PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG  
KABUPATEN KARO TAHUN 2020**

Hari/Tanggal : KAMIS, 15 APRIL 2021

Jenis FGD : PPK

Fasilitator :

Co-Fasilitator :

No	Nama	Alamat	No. Handphone	Tanda Tangan
1.	Diego Armando M	Rumoh kabangaleu	0853 6173 0103	
2.	Kuat Bostob Tarigan	Gay Uk	0822 6941 7971	
3.	KORNELIUS . BARUS.	Jl. lau Limba	0821 6637 1734	
4.	Sahwinia, M.Pd	Jl. Samura Gg. Basama	081376333889	
5.	Caendia Sembiring	Jl. Jamin Gg No 74 S. Mutah	081376817769	
6.	MARIUS TARIGAN	Jl. KATEPUL	081319559051	
7.	Elisa Tarigan	Kandibata.	0813 66866971	
8.	Antonius Harngan	Kabangaleu	0853 6296 0894	
9.	AGERITA SIREPU	SIGARANG - GARUNG.	0812 6012 2381.	
10.	SANDEPA BUNINGGA	KAMPUS IKRAM, F. JATE	081370084882	

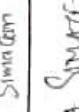
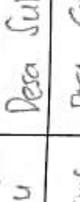
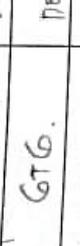
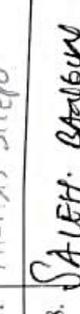
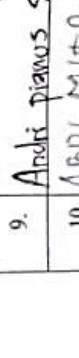
**ABSENSI FGD RISET PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG  
KABUPATEN KARO TAHUN 2020**

Hari/Tanggal : KAMIS, 15 APRIL 2021

Jenis FGD : PPS

Fasilitator :

Co-Fasilitator :

No	Nama	Alamat	No. Handphone	Tanda Tangan
1.	M. Satri Ginting	Desa Simacem	0821-655-3052	
2.	ANDI	Desa Simacem	081269367296	
3.	RURANWA SIRPAKJ	Desa Simacem	0813 7587 9477	
4.	OKTAVENUS SITEPU	Desa Sukatulu	082277334466	
5.	ANDRI PALDA GINTING	Desa GUNG PIATU	0822 73 23 22-43	
6.	JAYUTI GTG.	Desa NAMANS.	0813 9729 7007	
7.	THOMAS SITEPU	Desa Sukatulu	085297674748	
8.	SALEH. BABUBUN	Desa SI-GARPAK-6-GARPAK6	081596737266	
9.	Andri piavus Sembiting	Desa. Sigatang - gatang	08139737 2125	
10.	ABDI MITRA GIY	Desa SUWA MDEBI	081 362 083 896	

#### LAMPIRAN 4. Dokumentasi Kegiatan FGD



FGD PPK dan PPS



FGD Warga